



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut
Kabupaten Layak Anak Kluster I (Studi Implementasi
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak)**

Skripsi

Oleh

Annisa Syarifa

2014310046

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut
Kabupaten Layak Anak Kluster I (Studi Implementasi
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak)**

Skripsi

Oleh

Annisa Syarifa

2014310046

Dosen Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



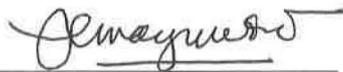
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Annisa Syarifa
NPM : 2014310046
Judul : "Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak Kluster I (Studi Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak)"

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Kamis, 19 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

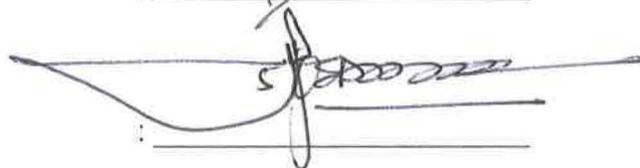
Ketua Sidang merangkap anggota
Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si.

: 

Sekretaris
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

: 

Anggota
Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Syarifa
NPM : 2014310046
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut
Kabupaten Layak Anak Kluster I (Studi
Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juli 2018



Annisa Syarifa

Abstrak

Nama : Annisa Syarifa

NPM : 2014310046

Judul : “Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak Kluster I (studi Implementasi tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh *Stakeholder* Kabupaten Garut dalam implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hasil Evaluasi KLA Tahun 2017 menunjukkan bahwa Garut memiliki score yang masih tergolong rendah untuk disebut sebagai Kabupaten Layak Anak. Oleh karenanya pelaksanaan pengembangan KLA Kabupaten Garut tahun 2018 ini lebih diperkuat dengan koordinasi yang dilakukan oleh para *Stakeholder*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan koordinasi dari Jay R. Galbraith. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Garut kebutuhan koordinasi antara *Stakeholders* adalah tinggi karena KLA di kabupaten Garut melibatkan banyak *Stakeholder*. Pendekatan *Basic Management Techniques* yang didukung oleh pendekatan *Increase Coordination Potential* dan *Reduce Need for Coordination* sangat diperlukan dalam pencapaian Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Garut.

Kata Kunci: Kebijakan, Koordinasi, Kabupaten Layak Anak

Abstract

Nama : Annisa Syarifa

NPM : 2014310046

Judul : “*Coordination Approach in Realizing Garut as a Child Friendly District Cluster I (implementation study on the Indonesian Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Regulation Number 11 Year 2011 on the Development Policy of Child Friendly Cities/Districts)*”

This research aims to analyze coordination done by Garut District Stakeholders in implementing the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection’s Regulation on KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak -- Child-Friendly City/District) development. In 2017, a KLA evaluation in Garut District reveals Garut District to score too low to be considered a Child-Friendly District. In consequence, the KLA development in Garut District in 2018 was even further strengthened with coordination done by Stakeholders.

The theory used in this research is Jay R. Galbraith’s coordination approach. The research method used is a qualitative method, with the data collection technique being document study, in-depth interviews, and observation.

Research results show that in the implementation of the KLA development in Garut the need for coordination is high due to KLA in Garut District having involved many Stakeholders. A Basic Management Techniques Approach supported by an approach in Increased Coordination Potential and Reduced Need for Coordination is vital in fulfilling the Policy of a Child-Friendly Garut District.

Keywords: Policy, Coordination, Child-Friendly District

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak Kluster I (Studi Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak)”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami. Berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak M. Fadiel Syahri dan Ibu Rini Permanasari yang telah memberikan dukungan moril serta materil selama masa Pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan FISIP UNPAR.
3. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si selaku Dosen Wali

5. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.
6. Bapak Rahmat dan Ibu Didah beserta jajaran di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membantu peneliti untuk mendapatkan data yang baik, dan valid.
7. Bapak dan Ibu di Bapeda, Diskominfo, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas PUPR, Polres Garut, BKKBN, P2TP2A, Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Garut. Ibu Rina LSM Semak dan bapak/ibu Kantor Kecamatan serta seluruh tokoh masyarakat di kecamatan-kecamatan percontohan di Kabupaten Garut yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan kerja samanya untuk mendapatkan data kegiatan untuk skripsi ini.
8. Kakak Farizal Eko Prasetyo dan Adik Rifaldi Faza Asfari yang senantiasa mengganggu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih. Aku cinta.
9. Candra Hasbiawan, kakak tingkat yang senantiasa memberi motivasi dan semangat, memberikan segala pandangan-pandangan yang membuat peneliti menjadi lebih baik, dan menjadi teman berdebat penulis. Terima kasih, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depan yang gemilang.
10. Karina, Marina, Ambar, Astrid, Dalila, Viera, Sheba, Amanda, Adella, teman-teman SMA yang menjadi penghibur serta tim hore hura-hura penulis saat pulang ke Jakarta.
11. Evita Nurhana dan Genta Maulidina selaku teman kos penulis yang telah memberikan dukungan, serta berbagi segala macam bentuk suka dan duka.
12. Teman-teman terhebat, terkeren, terasik, terbaik, dan tercinta selama perkuliahan, Vicky, Thalia, Greschia, Bianda, Rima, Olla, Fira, Salsa, Alya, Aji, Imam yang selalu memberikan banyak warna dalam perkuliahan, memotivasi, memberi semangat dalam masa perkuliahan dan dalam pengerjaan skripsi ini.

13. Keluarga Tjendana yang selalu mendengarkan dan menjadi teman-teman yang sering sekali di repotkan oleh penulis Dwiki, Fizky, Samuel, Greschia dan Genta.
14. Teman-teman enjoy publik, Ali, Nopun, Eggy, Iqbal, Dennis, Saddam, Putra, Havil, Om dimas, yang telah mewarnai hari-hari di kampus tercinta.
15. Khalif Rabbani Colombia selaku teman sejak 2013 yang menjadi teman bercerita suka dan duka dari masa sebelum perkuliahan sampai sekarang.
16. Teman KKL yang kemudian menjadi teman berbagi saya hingga saat ini, Desi, Alfred, dan Goris. Terima kasih telah berbagi hari-hari ceria, terima dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian.
17. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis disebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Bandung, 12 Juli 2018

Annisa Syarifa

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Kegunaan Penelitian	14
1.5.1 Kegunaan praktis.....	14
1.5.2 Kegunaan Teorits	14
1.6 Sistematika Penelitian.....	15
BAB II	
KERANGKA TEORI	17
2.1 Kebijakan Publik	17
2.2 Program	18
2.3 Koordinasi	20
2.3.1 Pengertian Koordinasi.....	20
2.3.2 Ciri-ciri Koordinasi	21
2.3.3 Bentuk Koordinasi	22
2.3.4 Hakikat Koordinasi	23
2.3.5 Fungsi Koordinasi.....	24
2.4 Model Pendekatan Koordinasi.....	26
2.5 Hubungan Pendekatan Koordinasi dengan Program	29
2.6 Model Penelitian.....	31
BAB III	
METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian	32

3.2 Peran Peneliti	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	35
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	35
3.4.1 Observasi.....	36
3.4.2 Wawancara Mendalam.....	38
3.4.3. Studi Dokumen	40
3.5 Pengecekan Keabsahan Temuan	41
3.6 Analisis Data.....	43
3.7 Operasionalisasi Variabel	45
BAB IV	
DESKRIPSI WILAYAH	50
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Garut	50
4.1.1 Kondisi Geografis	50
4.1.2 Kondisi Politik dan Pemerintahan.....	51
4.1.3 Penduduk dan Ekonomi	52
4.1.4 Sosial dan Budaya.....	53
4.2 Visi dan Misi	54
4.2.1 VISI.....	54
4.2.2 MISI	54
4.3 Profil Program Kabupaten Layak Anak (KLA).....	54
4.3.1 Kabupaten/Kota Layak Anak.....	54
4.3.2 Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	54
4.3.3 Landasan Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak.....	55
4.3.4 Prinsip dalam Pengembangan “KLA”	55
4.3.5 Strategi Pengembangan “KLA”	56
4.3.6 Indikator KLA.....	56
BAB V	
Analisa Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut Kabupaten	
Layak Anak Kluster I	57
5.1 Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	58
5.1.1 Akta Kelahiran.....	58
5.1.2 Informasi Layak Anak.....	63
5.1.3 Partisipasi Anak	68

5.2 Pendekatan Koordinasi yang diterapkan dalam Pencapaian KLA Kluster I 72

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN 74

6.1 Simpulan..... 74

6.2 Saran..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	
Gambar Indikator KLA	3
Gambar 1.2	
Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Garut tahun 2016 dan 2017	7
Gambar 2.1	
Model Pendekatan Koordinasi Jay R. Galbraith.....	26
Gambar 2.2	
Model Penelitian.....	31
Gambar 5.1	
Foto Penyerahan Akte Gratis kepada Masyarakat	60
Gambar 5.2	
Mobil Pelayanan Pencatatan Sipil.....	62
Gambar 5.3	
Capil Goes To Village	63
Gambar 5.4	
Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Garut	65
Gambar 5.5	
Gemar Membaca bersama Kepolisian	66
Gambar 5.6	
MCAP.....	67
Gambar 5.7	
Kongres FAD RIBUT dengan DP2KBP3A	69
Gambar 5.8	
Kegiatan FAD RIBUT	70
Gambar 5.9	
Kegiatan yang dilakukan NGO (Talk to Children)	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Permen KLA no. 11 tahun 2011

Lampiran 3. Panduan Wawancara

Lampiran 4. Kartu Bimbingan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sejauh ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan pembangunan yang berbasis kebutuhan (*need based approach*) dan pendekatan pembangunan berbasis hak (*right based approach*).¹ Secara normative, pendekatan pembangunan yang berbasis hak bisa dilihat antara lain, adanya Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bentuk konkrit dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak anak.

Sebagai perwujudan dari pemenuhan hak anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintahan untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan

¹ ¹ Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan hal. 15-17 di akses di web <https://www.komnasham.go.id/files/20131117-pembangunan-berbasis-hak-asasi-SSLP7PE.pdf> pada 26 Juni 2018 pukul 19.37

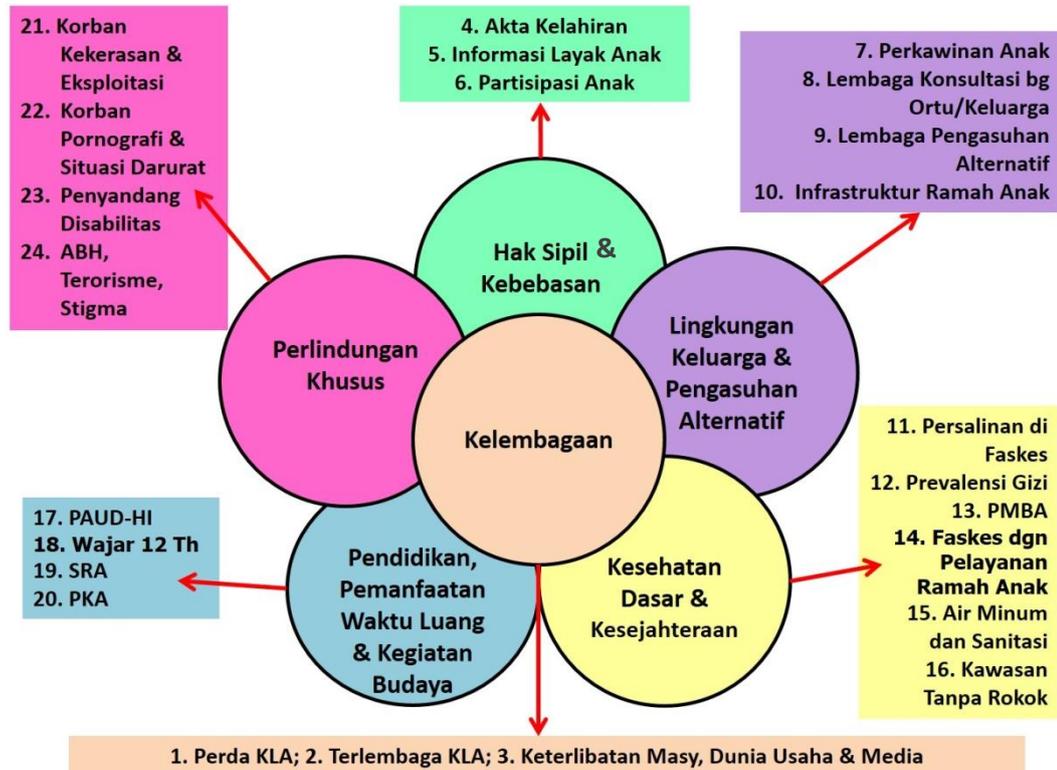
intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak². Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:³

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

² Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011

³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak hal 2

Gambar 1.1
Gambar Indikator KLA



KLA sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2006, tetapi baru tahun 2009 secara resmi diterbitkan Peraturan Menteri PP-PA Nomor 2 Tahun 2009 tentang KLA. Pada tahap awal, uji coba KLA dilakukan di 10 kabupaten/kota. Disebut kota/kabupaten layak anak, jika seluruh kecamatan di kabupaten / kota tersebut memenuhi standart layak anak, yaitu terpenuhinya pemenuhan hak anak di lima klusterKLA menjadi prioritas program nasional sejak dikeluarkannya Inpres No 1 Tahun 2010 yang secara operasional diterjemahkan dalam dua peraturan menteri yaitu:⁴

⁴ Petunjuk Teknis KLA

- Permen PPPA Ni 10/2010 tentang Panduan Pengembangan KLA bagi Provinsi
- Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak

tahun 2011 landasan hukum pengembangan KLA diperbarui melalui empat peraturan menteri yaitu:⁵

- Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA
- Permen PPPA No 12/2011 tentang Indikator KLA
- Permen PPPA No 13/2011 tentang Pengembangan KLA sebagai pengganti Permen PP-PA No.2 Tahun 2009
- Permen PPPA No 14/2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no 11 tahun 2011 dinyatakan akan adanya lima kategori KLA berdasarkan pada jumlah score penilaian pemenuhan standart KLA di lima kluster. yaitu:⁶

1. KLA Pratama : 500-600
2. KLA Madya : 601-700
3. KLA Nindya : 701-800
4. KLA Utama : 801-900
5. Kota KLA : 901-1000

Proses asesmen dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi yang akan diverifikasi oleh Tim dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tim Nasional tersebut kemudian mengeluarkan hasil penilaian berupa score yang

⁵ Petunjuk Teknis KLA

⁶ Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

menjadi dasar penggolongan bagi kabupaten /kota masuk dalam kategori yang mana.

Sampai tahun 2017, sudah ada 349 kab/kota yang mengembangkan KLA dalam berbagai kategori tetapi sejauh ini belum ada yang masuk kategori KLA, atau mendapatkan score penilaian diatas 900. Hampir semua kabupaten/kota mencoba untuk mengembangkan KLA, termasuk Kabupaten Garut. Score Kabupaten Garut pada tahun 2017 masih tergolong rendah, yaitu 358 atau sekitar 56,76% dari rata-rata nasional yang seharusnya minimal mencapai 70%.⁷ Score ini juga masih jauh dari target Kabupaten Garut yang diinginkan yaitu 700 untuk masuk dalam kategori Nindya.

Berbagai upaya dilakukan stakeholders di kabupaten Garut untuk mencapai target diatas. Pada Awal 2018 ini, seluruh SKPD (Satuan Kinerja Pemerintah Daerah) terkait dalam program KLA berencana meningkatkan nilai evaluasi untuk penilaian Kabupaten Garut Layak Anak tahun 2018. Tahun 2018 Garut mencanangkan Garut Kabupaten Layak Anak. Koordiansi ditingkatkan diantara stakeholders di kabupaten Garut. Sebanyak 28 SKPD dan Forum Anak Daerah RIBUT (Ririungan Urang Garut) serta forum anak Limbangan, mengadakan lokalatih yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Garut Layak Anak.

Meski sudah ada pelaksanaan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan sudah terbentuknya adanya sarana pelayanan yg ramah

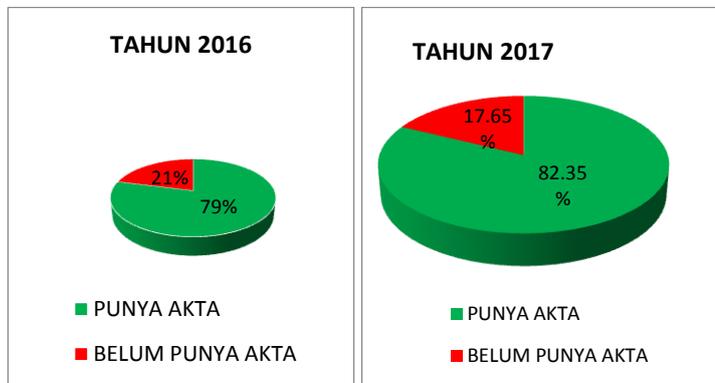
⁷ Hasil diskusi mengenai KLA dalam Lokalatih untuk mewujudkan Kabupaten Garut Layak Anak pada 16 Januari 2018

anak seperti Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, serta taman bermain anak dan daya dukung lainnya. Akan tetapi masih adanya kekurangan dalam penilaian. Kekurangan tersebut dilihat dari belum 100% anak di Kabupaten Garut yang sudah memiliki Akte kelahiran, belum semua anak mampu mengakses fasilitas informasi layak anak, baru ada 2 forum anak di kabupaten yang tercatat dan belum adanya kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan oleh forum anak Kabupaten Garut.

Berdasarkan indikasi permasalahan diatas, Garut mencanangkan Garut Kabupaten Layak Anak dan menurut Kabid Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) target yang dicapai harus berada di angka 700 poin agar garut menjadi Kabupaten Layak Anak kategori Nindya. Indikasi yang terlihat adalah belum terpenuhinya salah satu kluster KLA di Kabupaten Garut, hal ini terlihat dari data yang telah didapatkan pada kluster satu yang terdiri dari tiga indikator yaitu, akta kelahiran, informasi layak anak, dan partisipasi layak anak. Indikasi masalah yang terlihat seperti:

1. anak yang sudah memiliki akte kelahiran di Kabupaten Garut belum mencapai 100%. Berikut data akte kelahiran antara tahun 2016 dan 2017.

Gambar 1.2
Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Garut tahun 2016 dan 2017



Sumber : PPT
Ekspose KLA
Kabupaten garut
tahun 2018

Permasalahan yang pertama dilihat dari table diatas menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Akta kelahiran baru mencapai 82.35%, yaitu sejumlah 609.829 anak dari 740.312 jumlah anak di Kabupaten Garut. Padahal, dalam ukuran penilai KLA salah satu indikatornya yaitu anak memiliki akta kelahiran harus 100% anak memiliki akte kelahiran. Hal ini yang terus diupayakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut untuk mencapai keberhasilan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Akte Kelahiran Kabupaten Garut: “untuk mencapai 100% anak memiliki akte kelahiran agar mencapai Kabupaten Layak Anak, Disdukcapil bekerjasama dengan pihak lainnya agar mendata anak yang belum memiliki anak dan langsung menjemput anak-anak yang belum memiliki akta, akan tetapi ada kesulitan dimana sulitnya mendata anak yang tidak memiliki orang tua ataupun wali”.⁸

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Akta Kelahiran Kabupaten Garut pada 26 Januari 2018

2. Dalam penyediaan fasilitas informasi layak anak juga belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya keterbukaan informasi untuk anak. Menurut hasil wawancara Bidang Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tarogong Kaler: “untuk di Kecamatan Tarogong Kaler ini belum adanya informasi yang menyeluruh kepada masyarakat terutama anak. Contohnya dalam pengaduan mengenai kekerasan anak dirumah ataupun disekolah. Di kecamatan ini sendiri untuk penanganan dalam kasus-kasus tersebut juga belum ada penanganan tersendiri. Biasanya anak atau masyarakat yang mengalami kekerasan akan menuju Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, untuk perpustakaan sudah ada selain di sekolah-sekolah, kami juga memiliki perpustakaan keliling”.⁹ Dalam hal ini Kecamatan Tarogong Kaler masih kurang dalam hal ketersediaan fasilitas informasi layak anak. Karena belum adanya ketersediaan fasilitas informasi layak anak yang berupa pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah dan sebagainya, yang memang dikhususkan menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain yang tidak dicampur dengan informasi untuk orang dewasa.
3. Tingkat partisipasi anak masih rendah hal ini terlihat dari belum meratanya forum anak dan belum adanya kegiatan dalam wadah (forum). Menurut Kepala Bidang Pelayanan Akte Kelahiran Dinas Kependudukan dan

⁹ Hasil wawancara Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tarogong Kaler pada 23 Februari 2018

Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Garut dalam wawancara mengatakan bahwa “forum anak saat ini belum terbentuk, akan tetapi nantinya di setiap kelurahan/desa akan ada forum ramah anak yang menaungi permasalahan anak serta aspirasi anak dalam berkegiatan yang arahnya positif, namun saat ini pemerintah masih bekerja sama dengan *Non-Government Organization* (NGO) mengenai forum anak yang ada di kabupaten garut”.¹⁰

Forum anak ini akan bertujuan sebagai wadah dari anak dalam berkegiatan ataupun wadah dalam mencurahkan permasalahan yang terjadi. Saat ini forum anak masih diwadahi oleh P2TP2A yang menyediakan rumah singgah ramah anak. Belum adanya wadah yang mampu menaungi setiap permasalahan di desa/kelurahannya, membuat masih adanya kurangnya informasi dari pemerintah kepada anak. Kegiatan yang dilakukan pun dalam bentuk sosialisasi ataupun pelatihan saat ini masih di naungi oleh Dinas Sosial. Kegiatan pelatihan selalu dilakukan Dinas Sosial setiap jangka waktu 4 bulan sekali dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjangkau anak-anak yang akan memiliki keterampilan dalam bidang tertentu. Selain permasalahan tersebut, belum adanya daftar forum anak beserta kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Untuk di kabupaten Garut sendiri, forum Anak yang ada di Desa Limbangan Timur, Desa Galih Pakuwon, dan Desa Cigawir. Kegiatan forum tersebut bersamaan dengan forum KPMD (Komite Pendidikan Masyarakat Desa) yang didampingi oleh SEMAK dalam pelaksanaan program peduli.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kabid Pelayanan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Garut pada 26 Januari 2018

Indikasi selanjutnya adalah belum jelasnya koordinasi mengenai pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Garut karena belum adanya aturan dan prosedur yang jelas mengenai KLA. Misalnya RAD tidak ada dan belum ada aturan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab KLA kabupaten Garut secara mendetail pada setiap kluster dan indikatornya. Padahal hal tersebut diperlukan untuk koordinasi yang mendorong keberhasilan dalam mencapai Garut Kabupaten Layak Anak. Lalu menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A dalam kegiatan Loklatih “Menuju Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Layak Anak”, di Gino Feruci Hotel, Bandung mengatakan bahwa “Kebijakan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak perlu sinergitas, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, CSR, Lembaga masyarakat dan para tokoh masyarakat.”¹¹ Kemudian dalam Permen no 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang **mengkoordinasikan** kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Dari Permen tersebut dapat dilihat bahwa DP2KBP3A adalah Gugus Tugas KLA di Kabupaten Garut sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Garut. Dimana DP2KBP3A mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA dengan semua *Stakeholders* yang ada. Dari permasalahan tersebut terlihat koordinasi yang dilakukan SKPD di Kabupaten Garut kurang terintegritas sarannya karena kegiatan dari unit-unit kerja tiap SKPD tidak merata di setiap

¹¹ Pendapat Kepala Bidang Perlindungan Anak DP2KBP3A yang diakses melalui web <http://bappeda.garutkab.go.id/blog/1313-kabupaten-garut-bertahap-menuju-kabupaten-layak-anak/> pada 3 Juli 2018

daerah di Kabupaten Garut. Dalam hal ini sinergitas dari *stakeholder* pada kluster I diperlukan, yaitu dari DP2KBP3A, Bapeda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), DP2KBP3A, Kepolisian dan NGO.

Sementara Koordinasi sendiri dalam buku *Management Fifth Edition* James A.F Stoner dan R. Edward Freeman adalah proses pengintegrasian sasaran dan kegiatan unit-unit kerja terpisah (departemen atau bidang fungsional) untuk mencapai tujuan secara efektif. Kemudian dalam buku *Management* ini, terdapat tiga pendekatan pada pencapaian koordinasi yang efektif menurut Jay R. Galbraith yaitu, *Basic Management Techniques*, *Increase Coordination Potential*, dan *Reduce need for Coordination* untuk menentukan koordinasi semua *Stakeholders* dalam mencapai keberhasilan KLA Klaster I di Kabupaten Garut.

Dilihat dari tiga pendekatan pada pencapaian koordinasi yang efektif, untuk pendekatan *Basic Management Techniques* yang diterapkan melihat bagaimana rantai komando yang dilakukan oleh DP2KBP3A sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan KLA di kabupaten Garut dengan *stakeholder* lainnya untuk menjalin hubungan yang dengan demikian dapat memperlancar informasi dalam mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak. Kemudian *rules and procedures* berisikan kumpulan aturan dan prosedur yang dirancang para anggota pelaksana kebijakan KLA dalam menangani program dalam setiap indikatornya dalam pencapaian KLA kabupaten Garut. *Plans and goals* juga berisi rencana-rencana yang dapat dicapai untuk menjamin bahwa semua *stakeholder* bekerja kearah tujuan yang sama. Selanjutnya pendekatan *Increase coordination potential*

melihat koordinasi yang dilakukan melalui pemberian informasi secara vertical atau lateral. Dalam hal ini data di setiap indikator pencapaian KLA perlu diberikan informasinya kepada DP2KBP3A selaku *leading sector* KLA di Kabupaten Garut. Pendekatan yang ketiga adalah *Reduce need for coordination*, dalam hal ini pada indikator tertentu untuk menjalankan programnya perlu adanya pemberian sumber daya ekstra (*slack resources*) atau menciptakan unit-unit independent (*independent unit*) yang dapat melakukan tugas secara internal.

Dari hasil pemaparan tentang latar belakang masalah tersebut di atas mengenai pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak di Kabupaten Garut, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Garut dengan judul **“Pendekatan Koordinasi dalam Mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak Kluster I (studi Implementasi tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Garut, maka identifikasi masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Adanya indikasi bahwa kabupaten Garut belum memenuhi syarat sebagai kabupaten layak anak. Hal tersebut bisa dilihat dari belum terpenuhinya kluster 1 dari 5 kluster kabupaten/kota layak anak, yaitu

belum terpenuhinya indikator-indikator mengenai Hak Sipil dan Kebebasan di kabupaten Garut.

- b. Prosedur dan aturan yang jelas menyangkut KLA di kabupaten Garut belum ada. Misalnya RAD belum dibuat, selain itu belum ada aturan mengenai sistem pembagian tugas dan tanggung jawab di tiap kluster untuk memenuhi indikator pemenuhan KLA. Padahal hal-hal tersebut dibutuhkan untuk koordinasi dan memenuhi *Basic Management Techniques (rules & procedure)* dalam mendorong keberhasilan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Garut.

1.3 **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang telah disebutkan diatas serta identifikasi masalah, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. *“Bagaimana koordinasi antar DP2KBP3A, Disdukcapil, Diskominfo, dan kantor kecamatan dalam pemenuhan Akta Kelahiran anak di Kabupaten Garut?”*
2. *“Bagaimana koordinasi antar DP2KBP3A, Diskominfo, NGO, kepolisian bagian Perlindungan Anak (PA), dan kantor kecamatan dalam memenuhi informasi layak anak di Kabupaten Garut?”*
3. *“Bagaimana koordinasi antar DP2KBP3A, forum anak, dan NGO dalam memenuhi partisipasi anak di Kabupaten Garut?”*
4. *“Apa saja pendekatan koordinasi yang diterapkan dalam pencapaian Garut Kabupaten Layak Anak?”*

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, berikut ini akan dikemukakan garis besar yang ingin diperoleh setelah permasalahan dipecahkan dan dijawab, yaitu:

1. *“Untuk mendiskripsikan koordinasi yang dilakukan oleh DP2KBP3A dan semua Stakeholder dalam mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak.”*
2. *“Untuk merancang Rencana Aksi Daerah dalam mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak.”*

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara praktis maupun teoritis.

1.5.1 Kegunaan praktis

Sebagai acuan/data pembanding penelitian selanjutnya mengenai penerapan kebijakan KLA Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan pelajaran bagi penulis dan juga dapat memberikan motivasi terhadap Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Garut agar tetap menjaga keseriusan menuju Kabupaten layak anak yang akan dicapai.

1.5.2 Kegunaan Teorits

Sebagai acuan penelitian selanjutnya apakah kesesuaian antara teori dengan permasalahan yang ada di lapangan dapat menjawab masalahnya dan dapat diaplikasikan untuk mencapai keberhasilan kebijakan Kabupaten Layak Anak

1.6 **Sistematika Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka akan disajikan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah penelitian, apa yang menjadi fokus utama dalam penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI

Akan dibahas mengenai pengertian kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pedoman kegiatan kabupaten/kota layak anak untuk DP2KBP3A beserta Kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi percontohan KLA di Kabupaten Garut dalam Koordinasi dalam Mewujudkan Garut Kabupaten Layak Anak untuk pemenuhan hak sipil dan kebebasan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang menjadi metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, peran penulis, lokasi penelitian, sumber data penelitian. Selain itu prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV: PROFIL PENELITIAN

Menjelaskan mengenai kabupaten Garut dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V: PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai koordinasi Implementasi Permen KLA di Kabupaten Garut dengan melihat pendekatan koordinasi menurut Jay R. Galbraith dalam buku Management Fifth Edition James A.F Stoner dan R. Edward Freeman yang dibagi menjadi **Basic Management Techniques, Increase Coordination Potential dan Reduce need for coordination**

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan mengenai Simpulan, Saran.